

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo Putera, 2014, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, MMH, Jilid 43 No. 3.
- Antonio Rajoli, 2019, Ginting. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13.
- Aloysius R. Entah, 2016, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 No. 1.
- AV. Dicey, 1885, Introduction to Study of the Law of the Constitution, (London: Originally published.
- Arifin, 2015, Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 3.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta; Konstitusi Press
- Dacholfany, 2013, Peran Kepemimpinan Perguruan Tinggi Islam dalam Pembangunan Peradaban Islami. NIZAM, Vol. 02, No. 02.
- Dr. Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.
- Farida Maria, 2007, *Ilmu peraturan perundang-undangan 1*. Yogyakarta: kanisisus.
- F. A. Hayek, 2011, The Constitution of Liberty, The Definitive Edition, ed. Ronald Hamowy Chicago: University of Chicago Press.
- Fathorrohman, Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Hukum HUKMY, Vol. 1, No. 1, April 2021
- Herman, 2015, *perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara*, jurnal komunikasi hukum, Vol. 1, No. 1, Februari.
- Hamalik Omar, 2002, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta: Bumi Aksara.

- Huda Ni'matul, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://uinsatu.ac.id/kepeg/1402-surat-edaran-rektor-iain-tulungagung-nomor-147-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-surat-edaran-rektor-iain-tulungagung-tentang-penyesuaian-sistem-kerja-pegawai-dalam-upaya-pencegahan-penyebaran-covid-19-pada-lingkungan-iain-tulungagung> di akses pada tanggal 17 januari 2023
- <https://www.iainpare.ac.id/terapkan-maklumat-rektor-seluruh/> di akses pada tanggal 17 januari 2023
- <https://www.uin-suska.ac.id/2018/10/05/pengumuman-undangan-kuliah-umum-universitas/> di akses pada tanggal 17 januari 2023
- <https://www.uinsaid.ac.id/id/aturanperpu> di akses pada tanggal 17 Januari 2023
- <https://smkmucirebon.sch.id/daftar-perguruan-tinggi-kementerian-yang-memiliki-ikatan-dinas-maupun-tidak/> di akses pada tanggal 17 januari 2023
- I Gede Pantja As tawa, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- Jeffry Alexander, 2015, "Memaknai 'Hukum Negara (Law Throuh State)' Dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)," *Hasanudin Law Review* 1, no. 1 .
- Johanes Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Kusniati Retno, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5
- Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1544/UN 1.P/KPT/HUKOR/2019 Tentang Eselon Jabatan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Rektor Gadjah Mada
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor:1324/SK/R/UI/2017 Tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Universitas Indonesia
- Mahardika Ahmad Gelora dan Rizky Saputra, 2021, *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Sistem*

- Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legacy Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 1, No. 1.
- Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Mexasai Indra, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Muabezi Zahermann Armandz, 2017, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 .
- Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Muhammad Syukur, 2020, Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 tentang Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 8.
- Mangunsong Nurainun, 2017, Reduksi Fungsional Dosen (Analisis terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen), *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1.
- Moenir, 2014, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ni’matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nizar Samsul, 2001, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta : Gaya Media Pratama).
- Pidarta Made, 2002, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia (Jakarta: Kalam Mulia)
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pidarta, M. 2000. Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 26.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi

Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Radhie Teuku Mohammad, 1973, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II.

Rivai, V, 2003, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Raminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soehino, 1980, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty

Syahzevianda, dkk, 2019, Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3, No. 1 Desember.

Sayuti, 2011, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)," *Nalar Fiqih A* 1, no. 2 .

Syukur Muhammad, 2020, Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 tentang Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 8.

Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sayuti, 2011, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal kajian ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4, Nomor 2.

Siallagan Haposan, 2016, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2.

Soeharno, 2015, Ketertautan Rule of Law dengan HAM, *Jurnal Pusham Unimed*, Vol. VI, No.1.

- Suko Prayitno, 2017, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, Jurnal surya kencana: Dinamika Masalah Hukum, Vol.8. No. 2.
- Syambuddi Aziz, 2011, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I.
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru).
- Titin Astini dan Aah Johariyah, 2004, melakukan Proses Administrasi, Armico, Bandung.
- Universitas Pendidikan Indonesia, Museum Pendidikan Nasional: Rektor Dari Masa Ke Masa, <http://museumpendidikannasional.upi.edu/index.php/rektor-dari-masa-ke-masa>, Diakses Pada Jumat 2022
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
- Umadi Suryabrata, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya Made Hendra, 2013, “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum the Rule of Law,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 3.
- W. Friedmann, 1960, Legal Theory, London: Steven & Son Limited.
- Wina Sanjaya, 2007, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan Jakarta: Kencana.
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)
- Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.